

**PENGARUH REALISASI PENERIMAAN PAJAK PBB-P2 DAN RESTORAN PADA
PENERAPAN KEBIJAKAN INSENTIF PERPAJAKAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH KOTA BATAM DI MASA PANDEMI COVID-19**

Fathurrahman Dido

NPP. 29.0314

Asdaf Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau

Program Studi Keuangan Publik

Email: fathurrahmandido@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The Covid-19 pandemic that has occurred has resulted in all regional governments having to take policies in managing regional financial finance so that the implementation of government, politics, and socio-economic welfare and public health remains stable. The issues faced and the policies issued by the Batam city government became the entry point for designing a concept of opinion testing through a research activity. The author is interested in discussing the effect of the realization of PBB-P2 and Restaurant taxes on the implementation of the tax incentives policy which is taken as a stimulus and maintains the stability of Batam City's Original Regional Revenue. Purpose:* Through quantitative research methods with associative research types, this study aims to determine how the effect of the realization of PBB-P2 and Restaurant tax revenues on the application of tax incentives to PAD in Batam City. **Method:** This study uses 4 quantitative data analysis techniques, namely descriptive statistical analysis and classical assumption test, to test the existing data and the regression equation obtained has accuracy in estimation, is unbiased and consistent. multiple linear analysis and hypothesis testing, to test the effect of independent variables on the dependent variable and to prove the provisional hypothesis. In this study, the data collection technique used is a documentation study with two independent variables and the population and sample are the realization of local tax revenue in Batam. **Result:** Based on the results of the study, the PBB-P2 tax has a t-count value of 11,336 with a sig of 0.000 so that the PBB-P2 Tax variable statistically has a value (sig 0.000 < 0.05). Restaurant tax has a t value of 14,291 with a sig of 0.000, a restaurant tax statistically has a value (sig 0.000 < 0.05). The calculated F value is 1400.438 with a sig of 0.000, so that the Realization of PBB-P2 and Restaurant Taxes has a significant effect simultaneously on Regional Original Income. **Conclusion:** The final part of the analysis of this research is that 99.2% of the Regional Original Income variable can be explained as being strongly influenced by the PBB-P2 and Restaurant Tax variables.

Keywords : *Realization, Influence, PBB-P2, Restaurant, PAD.*

ABSTRAK

Latar Belakang (GAP): Pandemi covid-19 yang terjadi mengakibatkan seluruh pemerintah daerah harus mengambil kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah agar pelaksanaan pemerintahan, politik, dan kesejahteraan sosial ekonomi dan kesehatan masyarakat tetap stabil. Isu-isu yang di hadapi serta kebijakan yang di keluarkan pemerintah Kota Batam menjadi *entry point* untuk

merancang suatu konsep pengujian pendapat melalui suatu kegiatan penelitian. penulis tertarik membahas pengaruh dari realisasi pajak PBB-P2 dan Restoran pada penerapan kebijakan insentif pajak yang diambil sebagai stimulus dan menjaga stabilitas Pendapatan Asli Daerah Kota Batam. **Tujuan:** Melalui metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian Asosiatif penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh realisasi penerimaan pajak PBB-P2 dan Restoran pada penerapan insentif pajak terhadap PAD Kota Batam. **Metode:** Penelitian ini menggunakan 4 teknik analisis data kuantitatif yaitu analisis statistic deskriptif dan uji asumsi klasik, untuk menguji data yang ada dan persamaan regresi yang diperoleh memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. analisis linier berganda dan uji hipotesis, untuk menguji pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen dan pembuktian hipotesis sementara. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumentasi dengan dua variabel independent dan populasi dan sample adalah realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah kota batam. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pajak PBB-P2 memiliki nilai t hitung 11.336 dengan sig 0,000 sehingga variabel Pajak PBB-P2 secara statistic memiliki nilai (sig 0,000<0,05). Pajak Restoran memiliki nilai t hitung 14.291 dengan sig 0,000, Pajak Restoran secara statistic dengan nilai (sig 0,000< 0,05). nilai F hitung ialah 1400.438 dengan sig 0,000, sehingga Realisasi Pajak PBB-P2 dan Restoran memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah. **Kesimpulan:** Bagian akhir pada analisis penelitian ini bahwa 99,2% variabel Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan sangat di pengaruhi oleh variabel Pajak PBB-P2 dan Restoran.

Kata kunci : Realisasi, Pengaruh, PBB-P2, Restoran, PAD.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Wabah Coronavirus Disease (covid-19) yang terjadi ditetapkan sebagai bencana non alam oleh Presiden Republik Indonesia pada 13 April 2020 yang tertuang didalam Keputusan Presiden No. 12 Th. 2020. Pemerintah mengeluarkan peraturan perundangan menyikapi akibat implikasi sosial ekonomi dari bencana nasional covid-19 yakni Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Th. 2020 mengenai kebijakan keuangan negara serta stabilitas sistem keuangan guna penanganan pandemi covid-19, penjabaran lebih rinci tertuang pada Peraturan Presiden No. 4 Th. 2020 tentang postur APBN serta fokus sektor/pos pada anggaran belanja. Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri No. 35/PMK.07/2020 yang salah satu poinnya menginstruksikan bagi Pemerintah Daerah supaya melaksanakan penyesuaian pendapatan Pendapatann Asli Daerah (PAD) dengan menyelaraskan potensi pajak daerah serta retribusi daerah sebagai dampak dari menurunnya daya beli serta giat perekonomian nasional, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri No. 20 Th. 2020 serta Instruksi No. 1 Th. 2020 tentang Percepatan Penanganan covid-19 pada ranah Pemerintah Daerah berupa insentif perpanjangan waktu hak serta kewajiban perpajakan.

Semester I Th. 2020 realisasi pendapatan PAD Kota Batam terkena penurunan 33% dari Th. 2019 senilai 704,7 milyar, dampak dari terdapatnya instruksi Pemerintah mengenai kebijakan pembatasan sosial masyarakat sekala besar (PSBB) dan keputusan Wali Kota Batam yang menetapkan area status tanggap darurat covid-19, menyikapi instruksi Kemendagri serta Kemenkeu dan permasalahan yang terjadi Pemerintah Kota Batam mengeluarkan kebijakan guna penyesuaian PAD yakni Peraturan Wali Kota No. 21 Th. 2020 serta Keputusan Wali Kota KPTS.368/HK/IX/2020 mengenai Penundaan Pembayaran Pajak Terutang serta Pembebasan Denda dan/atau Bunga Pajak pada 6 (enam) obyek pajak terdampak. Berlaku pada bulan Juni sehingga penerapannya hingga tahap II pada bulan Desember 2020.

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan PAD dan Pajak Daerah Kota Batam
Th. 2019-2021

NO	Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Pendapatann Asli Daerah (PAD)				
1	2019	1.350.511.988.686,34	1.131.492.724.855,18	83.78
2	2020	1.499.536.772.588,46	1.035.786.061.741,06	69.07
3	s.d September 2021	1.499.536.772.588,46	729.992.161.098,14	50.82
Pajak Daerah				
4	2019	1.059.951.387.421,80	934.611.501,97	88.17
5	2020	1.225.272.547.554,19	755.863.969.522,76	61.69
6	s.d September 2021	1.160.140.439.166,00	576.072.967.230,89	49.66
Objek Pajak PBB-P2				
8	2020	206.000.000.000,00	167.195.989.795,00	81.16
9	s.d September 2021	199.557.681.369,00	150.955.461.534,00	75.65
Objek Pajak Restoran				
10	2020	123.700.000.000,00	66.976.986.012,94	54.14
11	s.d September 2021	110.490.000.000,00	46.314.060.455,91	41.92
Objek Pajak Hiburan				
12	2020	43.758.470.000,00	15.382.686.764,99	35.15
13	s.d September 2021	37.250.200.000,00	7.212.739.190,72	19.36
Objek Pajak Parkir				
14	2020	20.000.000.000,00	5.788.643.634,00	28.94
15	s.d September 2021	18.410.000.000,00	3.974.941.362,00	21.59
Objek Pajak Hotel				
16	2020	143.342.077.554,19	44.400.914.478,41	30.98

17	s.d September 2021	114.183.000.000,00	23.165.716.136,80	20.29
Objek Pajak Penerangan Jalan Umum				
18	2020	218.162.000.000,00	211.058.612.385,61	96.74
19	s.d September 2021	263.258.643.504,00	161.904.559.359,23	61.50

Sumber : BP2RD Kota Batam, data-data diolah peneliti 2021

Realisasi pendapatan pajak Th. 2020 senilai 755,8 milyar ataupun 61%, walau mendapat apresiasi KPK terhadap pencapaian realisasi pendapatan tergolong tinggi pada masa pandemi namun dari data-data tabel mampu ditinjau obyek pajak yang menyumbang defisit serta tak mencapai target realisasi pendapatan justru beberapa terdapat pada 5 (lima) obyek pajak yang diatur didalam Keputusan Wali Kota tersebut yakni pajak hotel serta pajak hiburan berada di bawah 50%, pajak restoran hanya 54% serta juga obyek pajak PBB-P2 hanya 80% yang juga diatur didalam kebijakan pada Peraturan Wali Kota No. 53 Th. 2020.

Pada tahun 2021 PAD Kota Batam hingga triwulan II berada cukup jauh dari target pendapatan yakni bersamaan rata-rata pada tiap sektor pajak daerah defisit 100 juta atas target realisasi setiap bulanya. Januari realisasi pendapatan pada sektor pajak daerah sekitar 58 juta ataupun 60% dari target pendapatan senilai 96 juta, obyek pajak restoran hingga bulan Juli realisasi pendapatan sekitar 41 milyar ataupun hanya 37% dari target pendapatan Th. 2021 senilai 110 milyar serta obyek pajak PBB-P2 hingga bulan Juli realisasi pendapatan sekitar 154 milyar ataupun hanya 68% dari target pendapatan senilai 400 milyar dimana kedua obyek pajak itu realisasi penerimaannya pada Th. lalu merupakan salah satu yang terbesar dari pada obyek pajak lain. Pemerintah Kota Batam di 2021 mengambil beberapa kebijakan bersamaan pada pola yang sama pada Th. pertama penanganan pandemi *covid-19* di Kota Batam yakni Keputusan Wali Kota KPTS.309/HK/VIII/2021 serta Peraturan Wali Kota 54 Th. 2021 terkait Penghapusan Denda Bunga Pajak serta Penunggakan Penangguhan Pokok Pajak yang akan dimulai pada bulan September ini.

Tabel 1.2
Rekapitulasi Data-data Obyek Pajak Th. 2020-2021

No	Nama Obyek Pajak	Jumlah Tahun Lalu	Terdaftar	Non Aktif	Jumlah Keseluruhan
s.d Juni Tahun 2020					
1.	Restoran	997	58	10	1.046
	Restoran	447	28	5	494
	Rumah Makan	218	9	2	228
	Kedai Kopi	298	20	3	319
	Catering	3	1	-	4
	Bar Restoran	1	-	-	1
s.d Juni Tahun 2021					
2.	Restoran	1.091	88	9	1170

		Restoran	503	22	7	518
		Rumah Makan	240	25	1	264
		Kedai Kopi	335	40	1	374
		Catering	11	1	-	12
		Bar Restoran	2	0	-	2
Tahun 2020						
3.	PBB-P2		-	-	-	351.800
Tahun 2021						
4.	PBB-P2		-	-	-	351.195

Sumber : BP2RD Kota Batam, data-data diolah peneliti 2021

Menurut data-data tabel hanya 10 obyek pajak restoran yang non active hingga Juli Th. 2020 serta hingga Juli Th. 2021 terdapatnya penambahan 88 obyek pajak serta hanya 9 (sembilan) non active ditinjau dari semakin banyaknya Bar&Resto juga cafecoffe yang terdapat di Kota Batam. Badan Pusat Statistic (BPS) juga menunjukkan pada Th. 2020 pengeluaran rata-rata perkapita masyarakat Kota Batam pada pengeluaran kelompok komoditas pangan (makanan serta minuman jadi) hanya regresi senilai 4% dari rata-rata Th. 2019 sebelum masa pandemi serta pada rata-rata perkapita pada pengeluaran non pangan (pajak pungutan serta asuransi) naik 0.08% dari rata-rata pada Th. 2019.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Beberapa permasalahan yang terjadi poinnya adalah pertama pada kebijakan yang di ambil oleh pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri tujuannya yaitu untuk melakukan penyesuaian pada Pemerintahan Daerah terkait Pendapatann Asli Daerah (PAD) dengan menyelaraskan potensi pajak daerah serta retribusi daerah sebagai dampak dari menurunnya daya beli serta giat perekonomian nasional dan Kementerian Keuangan dengan poin kebijakannya yaitu Percepatan Penanganan covid-19 berupa insentif perpanjangan waktu hak serta kewajiban perpajakan. maka pemerintah Kota Batam mengambil keputusan dengan mengeluarkan peraturan serta kebijakan yang juga sesuai dengan kondisi sosial ekonomi saat itu, yaitu poinnya adalah Penundaan Pembayaran Pajak Terutang serta Pembebasan Denda dan/atau Bunga Pajak pada 6 (enam) obyek pajak terdampak. Berlaku pada bulan Juni hingga bulan Desember 2020 serta pada bulan September hingga Desember Th. 2021 dengan pola substansi kebijakan yang sama yang mana diharapkan atas kebijakan yang diambil ini dapat menstimulus Pendapatan Asli Daerah terutama pada sektor pajak terdampak dimana BPPRD sebagai Perangkat Daerah pelaksana dari kebijakan tersebut.

Poin permasalahan kedua ialah selama priode pelaksanaan kebijakan pada tahun pertama oleh BPPRD Kota Batam, realisasi kelima objek pajak yang masuk pada peraturan teersebut justru tidak mencapai target realisasi dimana 3 dari dua objek pajak capaian realisasinya berada di bawah 50%, untuk pajak restoran dan PBB realisasi penenrimaan pajaknya yaitu 53% dan 80%. Disisi lain pemerintah Kota Batam justru mendapatkan apresiasi oleh KPK terkait pengelolaan pendapatan asli daerah pada penanganan tahun pertama *covid-19* yang transparan serta kebijakan yang dimabil juga menghasilkan jumlah penerimaan pada sector pajak menjadi salah satu yang tertinggi dari beberapa daerah di Indonesia.

Poin permasalahan ketiga ialah Pada Tn. 2021 juga PAD Kota Batam hingga triwulan II berada cukup jauh dari target pendapatan yakni bersamaan rata-rata pada tiap sektor pajak daerah defisit 100 juta atas target realisasi setiap bulanya. Januari realisasi pendapatan pada sektor pajak daerah sekitar 58 juta ataupun 60% dari target pendapatan senilai 96 juta, obyek pajak restoran hingga bulan Juli realisasi pendapatan sekitar 41 milyar ataupun hanya 37% dari target pendapatan Th. 2021 senilai 110 milyar serta obyek pajak PBB-P2 hingga bulan Juli realisasi pendapatan sekitar 154 milyar ataupun hanya 68% dari target pendapatan senilai 400 milyar dimana kedua obyek pajak itu realisasi penerimaannya pada Th. lalu merupakan salah satu yang terbesar dari pada obyek pajak lain.

Terahir ada pada aktivitas dan pola konsumsi masyarakat Kota Batam, Menurut data-data tabel hanya 10 obyek pajak restoran yang non active hingga Juli Th. 2020 serta hingga Juli Th. 2021 terdapatnya penambahan 88 obyek pajak serta hanya 9 (sembilan) non active ditinjau dari semakin banyaknya Bar&Resto juga cafe coffe yang terdapat di Kota Batam. Badan Pusat Statistic (BPS) juga menunjukkan pada Th. 2020 pengeluaran rata-rata perkapita masyarakat Kota Batam pada pengeluaran kelompok komoditas pangan (makanan serta minuman jadi) hanya regresi senilai 4% dari rata-rata Th. 2019 sebelum masa pandemi serta pada rata-rata perkapita pada pengeluaran non pangan (pajak pungutan serta asuransi) naik 0.08% dari rata-rata pada Th. 2019.

Berdasarkan penjelasan serta uraian atas data-data serta informasi yang dikemukakan, dan asumsi penulis atas isu-isu serta beberapa perihal fenomena yang terjadi pada Kota Batam semasa pandemi mampu dijadikan entry poin guna merancang sebuah konsep pengujian pendapat via sebuah aktivitas penelitian. Maka peneliti tertarik ingin meneliti terkait bagaimana realisasi pendapatan pajak khusus pada sektor pajak PBB-P2 serta Restoran itu pada penerapan kebijakan insentif perpajakan yang diambil Pemerintah Kota Batam sebagai bentuk penyesuaian pengelolaan PAD didalam percepatan penanganan pandemi *covid-19* bersamaan pada judul **“PENGARUH REALISASI PENERIMAAN PAJAK PBB-P2 DAN RESTORAN PADA PENERAPAN KEBIJAKAN INSENTIF PERPAJAKAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATAM DI MASA PANDEMI COVID-19”**.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian Muhamad Karyadi yang berjudul Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008-2017 (Muhamad Karyadi, 2020) yang menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan Teknik Pengumpulan data studi dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan hasil pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatann Asli Daerah dan retribusi daerah tidak pengaruh terhadap Pendapatann Asli Daerah, sedangkan pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatann Asli Daerah.

Penelitian Primandita Fitriandi berjudul Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Di Masa Pandemi *Covid-19* Terhadap Penerimaan PPN (Primandita Fitriandi, 2021) yang menggunakan metode penelitian kuantitatif asosiatif dengan Teknik Pengumpulan data studi dokumen. Penelitian ini menunjukkan hasil Dari kelima jenis insentif pajak yang diberikan pemerintah, ada dua jenis insentif yang berpengaruh signifikan secara positif terhadap penerimaan PPN yaitu insentif PPh Pasal 22 Impor dan insentif PPh Pasal 25. Sedangkan, insentif PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berupa pajak Ditanggung Pemerintah berpengaruh signifikan secara negatif terhadap penerimaan PPN.

Penelitian William Wijaya, dkk. yang berjudul Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dan retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam (William Wijaya, dkk., 2021) yang menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan Teknik Pengumpulan data studi

dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan hasil Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatann Asli Daerah dengan nilai t hitung sebesar 22,302 lebih besar daripada t tabel 2,00247. Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatann Asli Daerah dengan nilai t hitung sebesar 12,975 lebih besar daripada t Tabel yaitu sebesar 2,00247. Pajak daerah dan Retribusi daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatann Asli Daerah dengan diketahui nilai F hitung adalah sebesar 5755,871 lebih besar daripada F tabel yaitu sebesar .

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu dengan karakteristik penelitian yang berlandas pada sifat positivisme meneliti sample dan mengumpulkan serta menganalisis data-data statistic dengan tujuan mengetahui hubungan antara dua variabel, penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kuantitatif-asosiatif. Konteks penelitian yang dilakukan yakni pengaruh dari kebijakan insentif pepajakan yang dikeluarkan sebagai stumulus dalam pendapatan asli daerah dalam sektor pajak apakah berpengaruh secara signifikan atau tidak yang berlangsung selama masa pandemic *covid-19* tahun 2020-2021. Peneliti menggunakan oprasional variabel PAD sebagai dependen yang dipengaruhi dua variabel independent realisasi pajak PBB-P2 dan restoran. Instrument dan pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah studi dokumentasi yang dianalisis dengan metode kuantitatif asosiatif dimana data-data ditafsirkan menggunakan softwre aplikasi SPSS sehingga mampu memberikan gambaran yang sangat jelas terkait permasalahan yang diteliti.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran penjelasan pengaruh relosiasi pendapatan pada sektor pajak PPB-P2 dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam terhadap penerapan kebijakan insentif perpajakan semasa pandemic *covid-19* tahun 2020-2021.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian riset kuantitatif bersamaan pada jenis riset Asosiatif, oprasionalisasi variabel pada penelitian ini yaitu PAD sebagai variabel dependen yang dipengaruhi dua variabel independent realisasi pajak PBB-P2 dan restoran. Instrument dan pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah studi dokumentasi. dalam melakukan pengumpulan data-data primer, penulis juga melakukan wawancara terhadap beberapa orang informan yang terdiri dari kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam, Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan, Kepala Subbidang Intentifikasi dan Ekstentifikasi, serta Kepala Subbidang Evaluasi dan informasi.

Populasi dan sample pada riset penelitian ini adalah laporan realisasi pendapatan pajak daerah serta Pendapatann Asli Daerah Kota Batam selama pandemic covid-19, data-data yang digunakan merupakan data-data time series. Metode ataupun analisa yang dipakai didalam riset itu merupakan kuantitatif Asosiatif, data-data yang dianalisis dengan metode kuantitatif asosiatif dimana data-data ditafsirkan menggunakan softwre aplikasi SPSS sehingga mampu memberikan gambaran yang sangat jelas terkait permasalahan yang diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil riset yang dilaksanakan peniliti guna periode semasa pandemic covid-19 Th. 2020-2021 pada daerah Provinsi Kepulauan Riau khususnya Pemerintah Kota Batam, pada ketahui terjadi peningkatan fluktuatif pada penerimaan Asli Daerah pada sektor pendapatan Pajak Daerah.

menurut hasil statistik deskriptif diketahui bahwasanya Kota Batam mempunyai realisasi pendapatan penerimaan Asli Daerah pada sub sektor PBB-P2 serta Restoran terbesar selama pandemic covid-19 ya tersebut senilai Rp. 68.21 miliar serta Rp.11.3 miliar pada bulan Agustus 2021 serta Januari 2020. Sedangkan total pendapatan Pajak PBB-P2 serta Restoran terkecil, yakni Rp 1.94 miliar serta Rp.1.92 miliar dihasilkan pada awal Th. 2020 serta 2021.

Sebagaimana diketahui bahwa realisasi dari dua sub sektor pajak pada selama pandemic covid-19 bersifat fluktuatif dimana pada beberapa bulan terkena penurunan pendapatan dari target murni pencapaian yang sudah ditetapkan. Namun, dari hasil riset di atas ternyata menunjukkan bahwasanya realisasi pendapatan pajak PBB-P2 serta Restoran berpengaruh atas pendapatan penerimaan Asli Daerah, baik secara simultan serta parsial.

3.1. Statistik Deskriptif

pada tabel di atas mampu dijabarkan bahwasanya total data-data (N) yang diujikan merupakan sebanyak 24. Selain tersebut didapat hasil gambaran dari nilai maksimum, minimum, nilai rata-rata serta standar deviasi dari masing-masing variable merupakan sebagai berikut:

A. Pendapatan Asli Daerah

periode waktu selama 2 Th. digambarkan bahwasanya total PAD terbesar yakni Rp. 171.6 miliar yang mana dihasilkan pada Th. 2021 oleh Kota Batam, Sedangkan total PAD terkecil. yakni Rp 46.5 miliar dihasilkan pada bulan Mei Th. 2020. Selama 2 Th. rata-rata PAD yang diterima senilai Rp. 86.2 miliar bersamaan pada standar deviasinya merupakan senilai Rp. 25.25 miliar.

B. Pajak Restoran

Selama periode waktu 2 Th. diketahui bahwasanya total Realisasi pendapatan Pajak Restoran terbesar yakni Rp. 11.3 miliar yang mana dihasilkan pada Januari Th. 2020 oleh Kota Batam, Sedangkan total Realisasi pendapatan Pajak Restoran terkecil. yakni Rp 1.92 miliar dihasilkan pada Mei Th. 2020. selama 2 Th. rata-rata Realisasi pendapatan Pajak Restoran yang diterima senilai Rp. 8.21 miliar bersamaan pada standar deviasinya merupakan senilai Rp. 21.57 miliar.

C. Pajak PBB-P2

Selama periode waktu 2 Th. diketahui bahwasanya total Realisasi pendapatan Pajak PBB-P2 terbesar yakni Rp. 68.21 miliar yang mana dihasilkan pada Agustus Th. 2021 oleh Kota Batam, Sedangkan total Realisasi pendapatan Pajak PBB-P2 terkecil. yakni Rp 1.94 miliar dihasilkan pada Januari Th. 2020. selama 2 Th. rata-rata Realisasi pendapatan Pajak PBB-P2 yang diterima senilai Rp. 14.81 miliar bersamaan pada standar deviasinya merupakan senilai Rp. 16.17 miliar.

3.2. Uji Asumsi Klasik

3.2.1 Uji Normalitas Residual

Berdasar pada hasil uji normalitas yang memakai metode one sample kolmogrov-smirnov menunjukkan bahwasanya nilai residual variable dependent serta independent pada total sample (N) senilai 24 adalah 0,178. Maka mampu dikatakan data-data dari riset itu terdistribusi secara normal, sebab nilai residualnya lebih besar dari signifikansi 0,05 ataupun $0,178 > 0,05$ sampai model regresi itu mampu dipakai guna pengujian hipotesis.

3.2.2 Uji Multikolinieritas

Berdasarkan hasil data-data output table diketahui nilai tolerance lebih besar dari 0,01 sedangkan nilai VIF lebih kecil dari 10,00, maka mampu disimpulkan bahwasanya tak terdapat terjadi multikolinieritas.

3.2.3 Uji Autokorelasi

Berdasar pada hasil output data-data table diketahui nilai Durbin Watson senilai 0.858 sedangkan nilai dari tabel dw bersamaan pada signifikansi senilai 0,05 serta total data-data $n=24$ serta $k=2$ didapat nilai dL senilai 1,1878 serta dU senilai 1.5464. maka dikarenakan nilai Durbin Watson itu masih mendekati nilai 2 mampu disimpulkan bahwasanya tak terjadi terdapatnya autokorelasi.

3.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Dari hasil output pada gambar scatterplot, mampu digambarkan bahwasanya titik menyebar pada bawah dan atas sumbu Y, serta tak mempunyai bentuk pola yang teratur. Maka disimpulkan bahwasanya variable bebas diatas tak terjadi terdapatnya heteroskedastisitas ataupun bersifat homoskedastisitas.

3.3 Regresi Linier Berganda

Dari persamaan regresi $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$ menunjukkan bahwasanya $Y = -9.320.967.001 + 10.052 X_1 + 2.120 X_2 + e$. Koefisien-koefisien persamaan regresi linear berganda tersebut mampu dijabarkan sebagai berikut:

- A. Berdasar pada persamaan regresi menunjukkan nilai konstanta senilai -9.320.967.001 yang diartikan bahwasanya jikalau variable independent lainnya bernilai nol, maka variable penerimaan Asli Daerah terkena penurunan nilai senilai -9.320.967.001 satuan.
- B. Berdasar pada persamaan regresi menunjukkan nilai variable pajak PBB-P2 (X_1) memiliki arah koefisien regresi positif bersamaan pada penerimaan Asli Daerah yakni $\beta = 10.052$ yang mampu diartikan bahwasanya bila pajak PBB-P2 terkena peningkatan senilai 1% maka penerimaan Asli Daerah akan naik 10.052% bersamaan pada asumsi jikalau variable independent yang lain konstan.
- C. Pada persamaan regresi mampu ditinjau bahwasanya variable pajak Restoran (X_2) memiliki arah koefisien regresi positif bersamaan pada penerimaan Asli Daerah yakni $\beta = 2.120$ yang mampu diartikan bahwasanya bila pajak Restoran terkena peningkatan senilai 1% maka penerimaan Asli Daerah akan naik 2.120% bersamaan pada asumsi jikalau variable independent yang lain konstan.

3.4 Uji Hipotesis

3.4.1 Uji Parsial (Uji t)

Berdasar pada hasil pengujian regresi secara parsial pada tabel menunjukkan bahwasanya variable pajak Pajak PBB-P2 serta Restoran berpengaruh atas PAD pada Kota Batam, dijabarkan sebagai berikut bahwasanya :

H1 : Berdasar pada hasil regresi diketahui variable pajak PBB-P2 mempunyai nilai t nilai hitung senilai 11.336 bersamaan pada sig 0,000. perihal itu mampu diartikan bahwasanya t hitung (11.336) > t table (2.080) maka H1 diterima, sampai variable Pajak PBB-P2 secara statistic bersamaan pada $\alpha = 5\%$ mempunyai pengaruh yang signifikan atas PAD Kota Batam serta perihal itu dibuktikan bersamaan pada nilai (sig 0,000 < 0,05).

H2 : Berdasar pada hasil regresi diketahui variable Pajak Restoran mempunyai nilai t nilai hitung senilai 14.291 bersamaan pada sig 0,000. perihal itu mampu diartikan bahwasanya t hitung (14.291) > t table (2.080) maka H2 diterima sampai variable Pajak Restoran secara statistic bersamaan pada

$\alpha = 5\%$ mempunyai pengaruh yang signifikan atas penerimaan Asli Daerah serta perihal itu dibuktikan bersamaan pada nilai ($\text{sig } 0,000 < 0,05$).

3.4.2 Uji F (simultan)

Berdasarkan data-data output nilai F hitung merupakan 1400.438 bersamaan pada $\text{sig } 0,000$ sedangkan pada Ftabel didapat nilai 3,44, maka nilai itu menjelaskan bahwasanya nilai F hitung > F tabel sampai disimpulkan bahwasanya H_0 ditolak serta H_3 diterima serta mampu diartikan Realisasi Pajak PBB-P2 serta Restoran secara bersamaan ataupun simultan mempunyai pengaruh yang signifikan atas penerimaan Asli Daerah Kota Batam bersamaan pada nilai ($\text{sig } 0,000 < 0,05$).

3.4.3 Uji Koefisien Determinasi

Tabel 3.3
Hasil Uji Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.996 ^a	.993	.992	2.80403E+10	.858

a. Predictors: (Constant), PBBPP, Restoran
b. Dependent Variable: PAD

Berdasar pada hasil uji determinasi pada tabel diatas, besanya nilai koefisien determinasi ataupun adjust R2 merupakan 0,992 perihal itu diartikan bahwasanya 99,2% variable penerimaan Asli Daerah mampu dijelaskan ataupun dideskripsikan oleh variable Pajak PBB-P2 serta Restoran. Sedangkan sisanya ($100\% - 99,2\%$) adalah senilai 0,8% dijelaskan oleh variable lain diluar persamaan itu diatas.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penerapan kebijakan Insentif perpajakan oleh Pemerintah Daerah Kota Batam sebagai bentuk wujud percepatan penanganan *covid-19* dan penyesuaian Pengelolaan Keuangan Daerah pada sektor pajak, hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan hasil bahwa Pajak PBB-P2 mempunyai pengaruh yang signifikan atas PAD Kota Batam dibuktikan bersamaan pada nilai ($\text{sig } 0,000 < 0,05$), Pajak Restoran mempunyai pengaruh yang signifikan atas penerimaan Asli Daerah dibuktikan bersamaan pada nilai ($\text{sig } 0,000 < 0,05$) dan Realisasi Pajak PBB-P2 serta Restoran secara bersamaan ataupun simultan mempunyai pengaruh yang signifikan atas penerimaan Asli Daerah Kota Batam bersamaan pada nilai ($\text{sig } 0,000 < 0,05$). Berbeda halnya pada penelitian Muhamad Karyadi yang berjudul Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008-2017 (Muhamad Karyadi, 2020), Penelitian ini menunjukkan hasil pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatann Asli Daerah dan retribusi daerah tidak pengaruh terhadap Pendapatann Asli Daerah, sedangkan pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatann Asli Daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan hasil bahwa pada persamaan regresi menunjukan nilai variable pajak PBB-P2 (X1) memiliki arah koefisien regresi positif bersamaan pada penerimaan Asli Daerah yakni $\beta = 10.052$ yang mampu diartikan bahwasanya bila pajak PBB-P2 terkena peningkatan senilai 1% maka penerimaan Asli Daerah akan naik 10.052%, variable pajak Restoran (X2) memiliki arah koefisien regresi positif bersamaan pada penerimaan Asli Daerah yakni $\beta = 2.120$ yang mampu diartikan bahwasanya bila pajak Restoran terkena peningkatan senilai 1%

maka penerimaan Asli Daerah akan naik 2.120%. Berbeda halnya pada penelitian Primandita Fitriandi berjudul Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan PPN (Primandita Fitriandi, 2021) yang menggunakan metode penelitian kuantitatif asosiatif dengan Teknik Pengumpulan data studi dokumen. Penelitian ini menunjukkan hasil Dari kelima jenis insentif pajak yang diberikan pemerintah, ada dua jenis insentif yang berpengaruh signifikan secara positif terhadap penerimaan PPN yaitu insentif PPh Pasal 22 Impor dan insentif PPh Pasal 25. Sedangkan, insentif PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berupa pajak Ditanggung Pemerintah berpengaruh signifikan secara negatif terhadap penerimaan PPN.

hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan hasil bahwa Pajak PBB-P2 mempunyai pengaruh yang signifikan atas PAD Kota Batam dibuktikan bersamaan pada nilai (sig 0,000<0,05), Pajak Restoran mempunyai pengaruh yang signifikan atas penerimaan Asli Daerah dibuktikan bersamaan pada nilai (sig 0,000< 0,05) dan Realisasi Pajak PBB-P2 serta Restoran secara bersamaan ataupun simultan mempunyai pengaruh yang signifikan atas penerimaan Asli Daerah Kota Batam bersamaan pada nilai (sig 0,000< 0,05). Hal ini sama dengan hasil penelitian William Wijaya, dkk. yang berjudul Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dan retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam (William Wijaya, dkk., 2021) yang menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan Teknik Pengumpulan data studi dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan hasil Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatann Asli Daerah dengan nilai t hitung sebesar 22,302 lebih besar daripada t tabel 2,00247. Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatann Asli Daerah dengan nilai t hitung sebesar 12,975 lebih besar daripada t Tabel yaitu sebesar 2,00247. Pajak daerah dan Retribusi daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatann Asli Daerah dengan diketahui nilai F hitung adalah sebesar 5755,871 lebih besar daripada F tabel yaitu sebesar .

IV. KESIMPULAN

Berdasar pada uraian hasil dari riset serta pembahasan maka didapat kesimpulan riset yaitu Realisasi pendapatan pajak PBB-P2 terhadap penerapan Insentif perpajakan berpengaruh signifikan atas penerimaan Asli Daerah Kota Batam, perihal itu dipengaruhi oleh implementasi pelaksanaan kebijakan insentif perpajakan yang optimal sampai menstimulus wajib pajak didalam membayar piutang pajaknya. Realisasi pendapatan pajak PBB-P2 terhadap penerapan Insentif perpajakan berpengaruh signifikan atas penerimaan Asli Daerah Kota Batam, hal itu dipengaruhi oleh implementasi pelaksanaan kebijakan insentif perpajakan yang optimal sampai menstimulus wajib pajak didalam membayar piutang pajaknya. Realisasi pendapatan pajak PBB-P2 serta Restoran terhadap penerapan Insentif perpajakan berpengaruh signifikan secara simultan atas penerimaan Asli Daerah Kota Batam, hal itu dipengaruhi oleh implementasi pelaksanaan kebijakan insentif perpajakn yang optimal sampai menstimulus wajib pajak didalam membayar piutang pajaknya.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan didalam melakukan riset ini, baik pada segi total sample yang hanya meliputi 24 laporan realisasi pendapatan pada tiap bulan pada pemerintah Kota Batam, priode Th. riset yang hanya terbatas hingga 2 tahun, dan pembahasan mengenai penerimaan daerah yang berfokus hanya pada Pajak Daerah.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis mempunyai harapan terhadap penelitian selanjutnya agar lebih baik dan sempurna, Oleh karna tersebut diperlukan riset bersamaan pada ruang ranah yang luas, sebab hasil yang didapat nantinya dapat berbeda bila dilaksanakan teruntuk daerah lain pada Indonesia. riset lebih lanjut terdapat baiknya dilaksanakan didalam priode waktu lebih dari 5 Th. serta membahas lebih fokus lagi tentang bagaimana badan ataupun lembaga pemerintah daerah meningkatkan kualitas kompetensi serta profesi aparaturnya sebagai pelaksana

pengelolaan keuangan serta kebijakan-kebijakan yang pada keluaran supaya riset lebih jelas serta lengkap sampai mampu ditinjau bagaimana perencanaan sehingga pelaksanaan lebih rinci pada pengelolaan keuangan daerah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan Pemerintah Kota Batam khususnya kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Nareswari, Nindita. 2000. Desain Kebijakan Insentif Pajak Untuk Mendorong Industri Mobil Berteknologi Hybrid Di Indonesia. Jakarta: Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Suandy, Erly. 2006. Perpajakan. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.

Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: ANDI.

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA.

Hardani, dkk. 2020. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta

Panorama, Muhajirin. 2017. Pendekatan Praktis Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional

Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Instruksi Menteri dalam negeri No. 1 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kota Batam No. 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah

Peraturan Wali Kota Batam Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Hak dan Pemungutan Kewajiban Perpajakan

Peraturan Wali Kota Batam Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Jatuh Tempo Pengurangan Piutang Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi

Keputusan Wali Kota Batam KTPS.309/HK/VIII/2021 tentang Pemberian Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak daerah